

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran 2016–2020



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Menurut Pengeluaran

## Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016–2020

---



# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANGKA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2016-2020**

**ISSN** : 2776-5482  
**Nomor Publikasi** : 19050.1704  
**Nomor Katalog** : 9302023.1905  
**Ukuran Buku** : 21 x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xiv + 70 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

**Gambar Kulit:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah  
Sumber: freepik.com

**Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

**Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah.

# **TIM PENYUSUN**

Penanggung Jawab : Ir. Rizanal Mahmudin

Editor : Fitria Kurniawati, SST.

Penulis : Fadhila Ajeng Damaris, S.Tr.Stat.

Desain Cover : Fadhila Ajeng Damaris, S.Tr.Stat.

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran 2016-2020 ini dapat diselesaikan.

Publikasi PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran 2016-2020 menyajikan informasi dalam bentuk tabel, gambar serta analisis deskriptif serta memberikan gambaran tentang komposisi penggunaan barang dan jasa dalam memenuhi permintaan akhir seperti konsumsi rumah tangga, lembaga non profit, dan pemerintah pada 2016-2020, selain itu juga disajikan perkembangan agregat PDRB.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas publikasi ini untuk periode yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Koba, 23 April 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bangka Tengah



Ir. Rizanal Mahmudin



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>BAB I PENJELASAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB.....	5
<b>BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	19
2.5 Perubahan Inventori.....	24
2.6 Ekspor dan Impor Barang Serta Jasa.....	28
<b>BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran.....	33
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	39
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	42
3.4 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	44
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	48
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa.....	50
<b>BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB.....</b>	<b>53</b>
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal).....	55
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.....	57
4.3 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	58
4.4 Neraca Perdagangan ( <i>Trade Balance</i> ).....	59
4.5 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020 .....	34
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020 .....	34
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	36
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	37
Tabel 3.5	Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020 .....	38
Tabel 3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020.....	40
Tabel 3.7	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020.....	43
Tabel 3.8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020 .....	45
Tabel 3.9	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020.....	47
Tabel 3.10	Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020.....	49
Tabel 3.11	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020 .....	52
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020 .....	56
Tabel 4.2	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020.....	57
Tabel 4.3	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020 .....	58
Tabel 4.4	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020 .....	59

Tabel 4.5	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020.....	61
-----------	---	----

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (triliun rupiah), 2016-2020 .....	35
Gambar	3.2	Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	39
Gambar	3.3	Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	41
Gambar	3.4	Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	44
Gambar	3.5	Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	46
Gambar	3.6	Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	48
Gambar	3.7	Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	50
Gambar	4.1	PDRB per Kapita Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (ribu rupiah), 2016-2020 .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020 .....	69
Lampiran 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020 .....	69
Lampiran 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020 .....	69
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020 .....	70
Lampiran 5	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020.....	70
Lampiran 6	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Tengah (Jiwa), 2016-2020.....	70





# PENJELASAN UMUM





# penjelasan umum

## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah sebagai indikator penting untuk memonitor perekonomian secara makro. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya. Dalam perkembangannya, PDRB sudah dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

PDRB dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan PDRB tipe ini sangat bermanfaat untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Penyusunan PDRB dapat menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu menurut pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

### A. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan

# penjelasan umum

Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

## **B. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

## **C. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

Menurut pendekatan ini PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Penyusunan PDRB terus mengalami penyempurnaan terutama dari segi cakupan data dan metodologi penghitungan yang digunakan. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun dasar tahun tertentu, diganti sesuai dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia dan mengikuti saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengubah tahun dasar setiap 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Badan Pusat Statistik

# penjelasan umum

(BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, 2000, dan 2010. Mulai tahun 2015 digunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru
- Rekomendasi PBB tentang perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*)
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB.

## 1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

# penjelasan umum

- PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



# **METODE ESTIMASI & SUMBER DATA**



# metode estimasi & sumber data

## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor, yaitu: korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT). Sektor rumah tangga selain berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### A. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Individu/kelompok individu tersebut mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

### B. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut 12 COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

- Makanan dan minuman non alkohol
- Minuman beralkohol dan rokok
- Pakaian dan alas kaki
- Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lain
- Furnitur, peralatan rumah tangga, dan perbaikan rutin rumah
- Kesehatan
- Transportasi/angkutan



# metode estimasi & sumber data

- Komunikasi
- Rekreasi dan kebudayaan
- Pendidikan
- Penginapan, hotel, dan restoran
- Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

- Makanan, Minuman, dan Rokok
- Pakaian dan Alas Kaki
- Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- Kesehatan dan Pendidikan
- Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- Hotel dan Restoran
- Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);  
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.

# metode estimasi & sumber data

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contohnya: pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## C. Penghitungan PKRT Tahunan

### 1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan, dan pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

### 2) Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk

# metode estimasi & sumber data

beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB masing-masing kelompok COICOP dengan IHK tahun dasar 2010 dari masing-masing kelompok COICOP yang sesuai.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah dalam penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - i) Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
  - ii) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
- b. Terhadap data poin a dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- c. Data poin b dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- e. Susun indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin d dengan hasil poin e.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

# metode estimasi & sumber data

## A. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *non profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi sosial (orsos), organisasi profesi (orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa (OBK).

## B. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPR) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

# metode estimasi & sumber data

- Konsumsi antara, contohnya: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, faksimile, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- Kompensasi tenaga kerja, contohnya: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contohnya: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

## C. Penghitungan PKLNPRT Tahunan

### 1) Sumber Data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT  
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

### 2) Metode Penghitungan

Metode estimasi PKLNPRT menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$  : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

# metode estimasi & sumber data

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$  : Jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

$X$  : PKLNPRT ADHB

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKLNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara *men-deflate* PKLNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

# metode estimasi & sumber data

## A. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- Memproduksi jasa. Contohnya: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditi (pendapatan jasa).

## B. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Kabupaten mencakup: a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten; b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah kabupaten; c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten; d. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten bersangkutan.

# metode estimasi & sumber data

Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, merupakan pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya)
- Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, merupakan pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, *Resource and Development*, dan sebagainya).

Pengeluaran pemerintah meliputi:

- Administrasi umum
- Pelayanan pemerintah (gratis atau hampir gratis) seperti pendidikan, kesehatan, serta jasa lainnya
- Lembaga non profit yang utamanya dikontrol dan dibiayai oleh pemerintah
- Pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang
- Belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana.

Klasifikasi ekonomi konsumsi akhir pemerintah meliputi:

- Konsumsi antara
- Balas jasa tenaga kerja
- Konsumsi barang modal
- Penjualan (output pasar/market output)
- Transfer berupa barang
- *Own account capital formation*
- *Gross capital formation (purchased) Subsidies*
- *Property income*
- *Social benefits other than in kind*
- Transfer berjalan lainnya
- Transfer modal/*capital*



# metode estimasi & sumber data

## C. Penghitungan PKP Tahunan

### 1) Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kementerian Keuangan atau DPPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan
- IHPB umum tanpa ekspor, indeks upah, indeks implisit PMTB, dan IHK umum dari BPS.

### 2) Metode Penghitungan

#### a. PKP Kabupaten ADHB

Secara umum, PKP ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PKP kabupaten ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi di wilayah kabupaten + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

# metode estimasi & sumber data

## b. PKP Kabupaten ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB merupakan nilai arus barang modal yang terjadi akibat penambahan barang modal baru dikurangi pengurangan barang modal bekas, ditambah perbaikan besar atas barang modal atau aset tetap dan biaya transfer/pemindahan kepemilikan atas aset-aset yang tidak diproduksi. Sementara perubahan inventori merupakan perubahan kuantitas bahan baku, penolong, barang jadi dan setengah jadi maupun suku cadang yang dikuasai oleh perusahaan.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

Penambahan aset tetap atau yang dikenal sebagai PMTB pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai oleh suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

# metode estimasi & sumber data

## A. Konsep dan Definisi

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Sebagai pengecualian, kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

## B. Cakupan

Dalam publikasi ini, PMTB dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bangunan dan Nonbangunan. PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, sistem persenjataan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan hutan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir, dan erosi).

# metode estimasi & sumber data

## C. Penghitungan PMTB Tahunan

### 1) Sumber Data

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Hasil Survei Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah dari BPS.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Direktorat Statistik Industri (pada level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian.
- Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi.
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.
- Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan.
- Statistik Kendaraan Bermotor, Samsat.
- Statistik Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi.

### 2) Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sementara pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai

# metode estimasi & sumber data

industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau suplai dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

## a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan cara PMTB ADHB tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

## b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (suplai), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. *Pertama*, dengan mengalokasi *output* mesin, alat angkut, dan barang modal lain yang menjadi

# metode estimasi & sumber data

pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan *kedua*, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB digunakan metode produksi dengan cara nilai PMTB ADHK tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sementara PMTB ADHK-nya diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

# metode estimasi & sumber data

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADHK diperoleh dengan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sementara data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan *output* industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai sub komponen investasi sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai komponen aset atau harta lancar perusahaan. Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

# metode estimasi & sumber data

## A. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

## B. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;



# metode estimasi & sumber data

- Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

## C. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

### 1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan atau Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi.

### 2) Metode Penghitungan

# metode estimasi & sumber data

Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara lebih rinci dan berkesinambungan.

## a. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADHK menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

## b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB

# metode estimasi & sumber data

dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## 2.6 EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari luar daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

# metode estimasi & sumber data

## A. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Pada dasarnya metode pengukuran jenis transaksi eksternal (baik antar negara maupun antar daerah) memiliki kesamaan prinsip, dalam artian yang satu akan menambah jumlah PDRB dan yang lainnya akan mengurangi jumlah PDRB. Perbedaan yang sangat mendasar adalah dalam hal penilaian, karena menyangkut alat pembayaran.

## B. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

- Net Ekspor antar daerah

## C. Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

### 1) Sumber Data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

### 2) Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sementara Import



# metode estimasi & sumber data

barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sementara net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran. Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri ADHK dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB menurut jenis barang untuk ekspor-impor barang luar negeri dan IHK jasa untuk ekspor impor jasa luar negeri sebagai deflatornya.

<https://bangkatengahkab.psn.id>



# TINJAUAN PEREKONOMIAN



# tinjauan perekonomian

Proses pembangunan ekonomi berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan sebagai akibat peningkatan transaksi perdagangan.

Setiap komponen pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah), sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Penjelasan rinci tentang perilaku masing-masing komponen pengeluaran tersebut akan diuraikan pada bagian berikut.

## 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BANGKA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan bagaimana pendapatan yang diciptakan dalam proses ekonomi dari berbagai sektor produksi digunakan masyarakat untuk konsumsi akhirnya. Dengan kata lain, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan mengenai penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir atau output final (*final output*). Pengguna konsumsi akhir ini adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi di wilayah domestik.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah dapat digambarkan melalui agregat PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020), PDRB atas dasar harga berlaku cenderung mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 (lihat Tabel 3.1 di bawah). Hal ini berkaitan dengan pandemi *covid-19* yang menyerang hampir semua negara di seluruh dunia. Dampak pandemi *covid-19* bagai efek domino, pada awalnya melemahkan berbagai aktivitas ekonomi, hingga pada akhirnya menyebabkan penurunan daya beli berbagai kalangan. Penurunan daya beli tersebut yang menyebabkan penurunan nilai PDRB menurut pengeluaran.



# tinjauan perekonomian

**Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4 943	5 505	5 987	6 550	6 531
2. Konsumsi LNPRT	56	63	68	77	79
3. Konsumsi Pemerintah	959	1 037	1 090	1 156	1 149
4. PMTB	1 971	2 192	2 443	2 771	2 582
5. Perubahan Inventori	40	28	30	35	4
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-500	-853	-1 405	-2 021	-1 896
<b>PDRB</b>	<b>7 469</b>	<b>7 972</b>	<b>8 213</b>	<b>8 568</b>	<b>8 449</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Tabel 3.1 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran mencapai 8,45 triliun rupiah, menurun 119 miliar rupiah dari tahun 2019 yang mencapai 8,57 triliun rupiah. Jika dilihat perkomponen, maka konsumsi rumah tangga memiliki sumbangsih terbesar terhadap PDRB ADHB. Pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga menyumbang 6.550 miliar rupiah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah namun menurun menjadi 6.531 miliar rupiah pada tahun 2020.

**Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 463	3 645	3 833	4 013	3 977
2. Konsumsi LNPRT	39	41	44	49	50
3. Konsumsi Pemerintah	617	651	668	684	661
4. PMTB	1 275	1 335	1 431	1 555	1 448
5. Perubahan Inventori	40	27	31	36	6
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1	-78	-194	-453	-427
<b>PDRB</b>	<b>5 433</b>	<b>5 621</b>	<b>5 813</b>	<b>5 884</b>	<b>5 715</b>

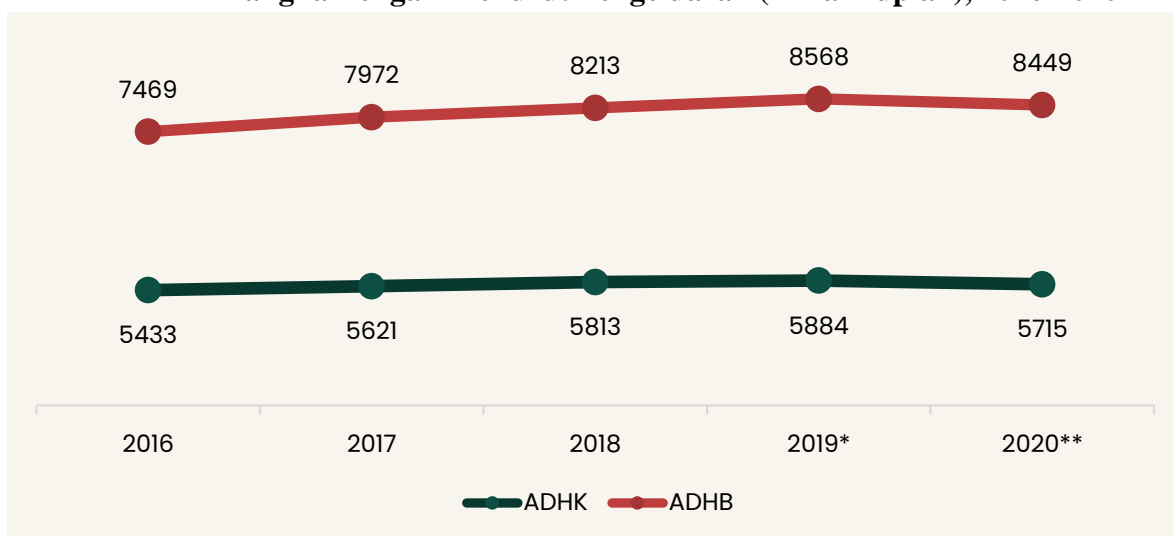
Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

# tinjauan perekonomian

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Pada tahun 2020, PDRB ADHK menurut pengeluaran adalah sebesar 5,72 triliun rupiah, menurun 169 miliar rupiah dari tahun 2019 yang mencapai 5,88 triliun rupiah. Selama tahun 2016-2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas. Sama halnya dengan PDRB ADHB, total pengeluaran akhir PDRB menurut pengeluaran ADHK juga menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi *covid-19*.

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK dimana semakin lama perbedaannya semakin besar. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Semakin besarnya perbedaan PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara agregat.

**Gambar 3.1 Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

# tinjauan perekonomian

Pembentukan PDRB tidak terlepas dari kontribusi semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta net ekspor barang dan jasa atau ekspor dikurangi impor. Pada tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, produk barang dan jasa yang dihasilkan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (pada 5 tahun terakhir selalu di atas 50 persen). Peranan net ekspor (selisih ekspor dan impor) selama kurun waktu lima tahun terakhir bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kecenderungan menurunnya net ekspor menunjukkan bahwa nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Kecilnya kontribusi nilai net ekspor mengindikasikan bahwa selisih antara impor dan ekspor semakin besar.

**Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	66,18	69,05	72,90	76,45	77,30
2. Konsumsi LNPRT	0,75	0,79	0,83	0,90	0,93
3. Konsumsi Pemerintah	12,84	13,01	13,27	13,49	13,60
4. PMTB	26,39	27,50	29,74	32,34	30,56
5. Perubahan Inventori	0,53	0,35	0,37	0,41	0,05
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,69	-10,70	-17,11	-23,59	-22,44
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, produk yang dikonsumsi sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 50 persen), bahkan mencapai 77,30 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) pada tahun 2020 juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi 30,56 persen.

Selain itu, kontribusi konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2020 mencapai 13,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar, masih berada di bawah kontribusi konsumsi rumah tangga dan PMTB. Namun, selama empat tahun terakhir, neraca perdagangan Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan posisi defisit, terlihat dari net ekspor yang negatif yang berarti impor lebih tinggi dari ekspor.

# tinjauan perekonomian

**Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,79	5,25	5,16	4,71	-0,89
2. Konsumsi LNPRT	9,96	6,39	7,42	11,79	0,55
3. Konsumsi Pemerintah	4,13	5,43	2,66	2,24	-3,33
4. PMTB	8,1	4,73	7,15	8,71	-6,89
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>3,05</b>	<b>3,46</b>	<b>3,42</b>	<b>1,23</b>	<b>-2,87</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Agregat makro lainnya yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor. Selama tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 1,66 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2016 berkisar antara -2 hingga 3 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 3,46 persen. Namun, setelah 2017, perekonomian mengalami perlambatan hingga pada 2019, melambat menjadi 1,23 persen. Tahun 2020, perekonomian Kabupaten Bangka Tengah kembali mendapat tekanan hingga berkontraksi pada 2,87 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh dampak dari pandemi *covid-19* yang meruntuhkan tatanan perekonomian global.

Selain pertumbuhan ekonomi, agregat makro lainnya yang penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi/deflasi. Kenaikan perubahan harga yang terjadi di masyarakat disebut dengan inflasi, sedangkan perubahan harga yang menurun disebut dengan deflasi. Tingginya perubahan harga atau inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.

# tinjauan perekonomian

Penghitungan PDRB menghasilkan tingkat perubahan harga yang dikenal dengan *deflator* PDRB. *Deflator* PDRB didasarkan pada penghitungan yang mengandung seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga *deflator* PDRB merupakan indeks harga yang berbasis luas yang seringkali digunakan untuk mengukur inflasi.

**Tabel 3.5 Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020**

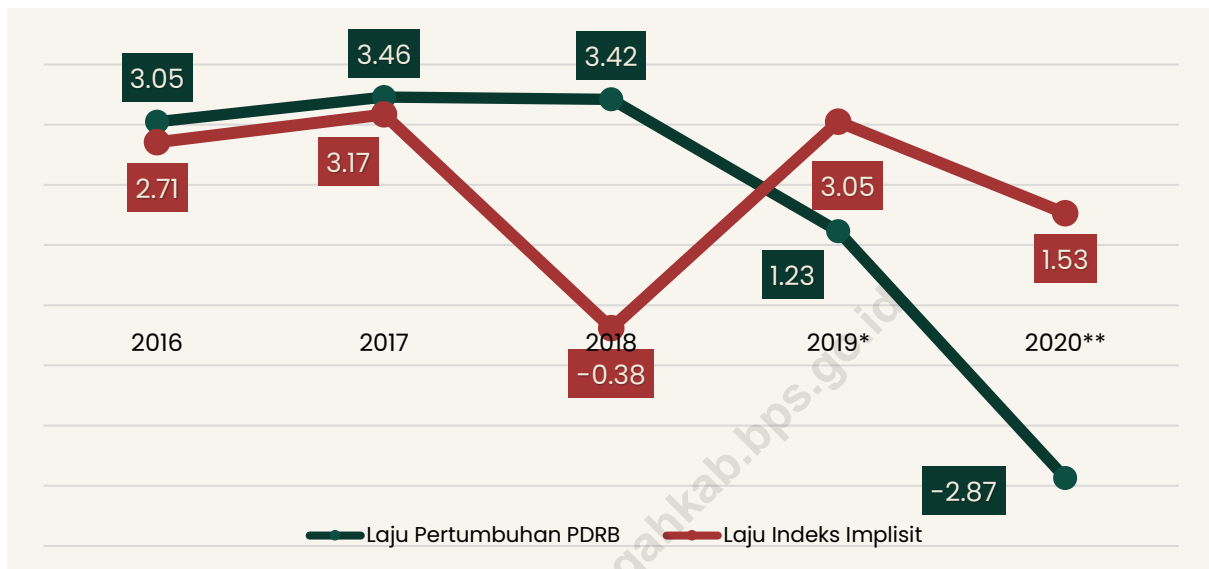
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,90	5,82	3,43	4,47	0,61
2. Konsumsi LNPRT	5,70	4,93	0,48	1,75	1,01
3. Konsumsi Pemerintah	8,69	2,56	2,43	3,75	2,78
4. PMTB	7,40	6,22	3,99	4,34	0,06
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>2,71</b>	<b>3,17</b>	<b>-0,38</b>	<b>3,05</b>	<b>1,53</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Perubahan harga untuk berbagai komponen PDRB menurut pengeluaran dapat diukur dengan laju indeks implisit. Indeks implisit pada PDRB menurut pengeluaran merupakan perbandingan antara komponen-komponen PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan 2010. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa laju indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) selama tahun 2016-2020 laju implisit mengalami fluktuasi dengan nilai antara -0,38 persen hingga 3,17 persen. Laju implisit positif menandakan bahwa terjadi peningkatan harga dibandingkan dengan tahun 2010. Namun, pada 2018, laju indeks implisit mengalami penurunan menjadi negatif, yaitu -0,38. Laju implisit negatif ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan harga dibandingkan dengan tahun 2010. Selama rentang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, laju indeks implisit tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,17 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar -0,38 persen.

# tinjauan perekonomian

**Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2016-2020 konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran konsumsi ditentukan oleh dua hal yaitu pendapatan per kapita riil dan elastisitas pendapatan terhadap konsumsi. Secara makro, berubahnya pendapatan akan diikuti oleh berubahnya konsumsi. Tambahan pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan konsumsi menunjukkan kecenderungan dalam mengkonsumsi atau perilaku mengkonsumsi di suatu masyarakat. Kecenderungan mengkonsumsi dapat diukur dengan menggunakan indikator MPC (*Marginal Propensity to Consume*).

Secara makro, MPC diperoleh dari perbandingan antara perubahan konsumsi dengan perubahan PDRB. Semakin tinggi kecenderungan masyarakat mengkonsumsi, MPC-nya semakin

# tinjauan perekonomian

besar, sedangkan hasrat menabung atau MPS (*Marginal Propensity to Saving*) akan semakin kecil.

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 77,30 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 66,18 persen.

**Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar rupiah)	4 943	5 505	5 987	6 550	6 531
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	3 463	3 645	3 833	4 013	3 977
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	66,18	69,05	72,90	76,45	77,30
Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (juta rupiah)					
a. ADHB	26,76	29,19	31,12	33,38	32,65
b. ADHK 2010	18,75	19,33	19,92	20,46	19,89
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi RT	7,79	5,25	5,16	4,71	-0,89
b. Konsumsi per Kapita	5,45	3,02	3,52	2,57	-2,87

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Pandemi *covid-19* memiliki pengaruh pada pengeluaran rumah tangga, terlihat dari nilai PDRB menurut pengeluaran ADHB dan ADHK tahun 2020 yang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi *covid-19* melemahkan perekonomian sebagian besar rumah tangga, sehingga masyarakat terpaksa harus membatasi dan mengurangi berbagai pengeluaran. Selain itu, karena dibatasinya penggunaan berbagai moda transportasi, peraturan *physical distancing*, pengaturan *school/home from home*, serta pembatasan jumlah pengunjung di tempat umum, menyebabkan pengeluaran transportasi, akomodasi, dan restoran rumah tangga menurun cukup drastis.

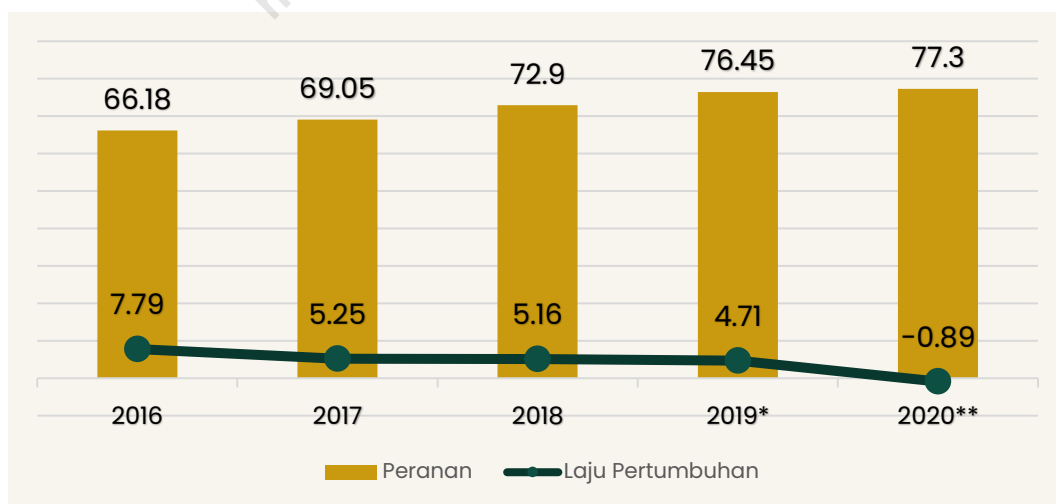
Secara nominal, setiap rumah tangga di Kabupaten Bangka Tengah selama periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan pengeluaran setiap tahunnya, kecuali

# tinjauan perekonomian

pada tahun 2020. Pada tahun 2016 setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 26,76 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 33,38 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pengeluaran rumah tangga menurun menjadi 32,65 juta rupiah per tahun.

Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan selama periode tahun 2016-2020, rata-rata konsumsi rumah tangga per orang tumbuh pada kisaran antara -0,89 hingga 7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,79 persen. Pertumbuhan selalu mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2020 terkontraksi sebesar 0,89 persen di tahun 2020. Pertumbuhan konsumsi per kapita memiliki pola yang senada dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, namun pertumbuhan konsumsi per kapita memiliki pertumbuhan yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

**Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Secara total, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami perlambatan. Jika dibandingkan antara peranan



# tinjauan perekonomian

konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Pengeluaran dan laju pertumbuhan pada tahun 2016, tidak ditemukan pola khusus. Peranan konsumsi rumah tangga selalu meningkat setiap tahun sedangkan laju pertumbuhannya cenderung melambat dan bahkan mengalami satu kali kontraksi. Tahun 2016 memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 7,79 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu terkontraksi sebesar 0,89 persen. Tahun 2020, kinerja konsumsi rumah tangga terkontraksi disebabkan oleh pandemi *covid-19*. Selain itu, sumber daya alam timah, sebagai salah satu tumpuan utama pendapatan rumah tangga pun semakin sulit dicari.

Peranan konsumsi rumah tangga dalam PDRB Pengeluaran cukup tinggi dan cenderung meningkat. Selama tahun 2016-2020, peranannya meningkat dari 66,18 persen menjadi 77,30 persen di tahun 2020. Tingginya peranan konsumsi rumah tangga ini dikarenakan masih besarnya konsumsi masyarakat dan kebutuhan yang terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga inflasi yang turut mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Dari berbagai komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran, konsumsi LNPRT merupakan komponen yang mempunyai kontribusi terkecil. Selama periode tahun 2016-2020, kontribusinya di bawah 1 persen. Pada tahun 2020 kontribusi pengeluaran konsumsi akhir LNPRT hanya mencapai 0,93 persen terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah (lihat tabel 3.7 di samping). Kecilnya nilai kontribusi ini dikarenakan masih kecilnya skala aktivitas lembaga sosial, kemasyarakatan, organisasi profesi, politik, dan sejenisnya di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, peran lembaga nonprofit perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan jumlah kegiatan lembaga nonprofit agar memberikan kontribusi yang lebih besar. Pada saat ini, sudah terlihat berbagai lembaga untuk mensosialisasikan masyarakat agar turut serta dalam proses pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan. Respons masyarakat pun terlihat positif, hal ini terbukti lebih banyak masyarakat yang semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.

# tinjauan perekonomian

**Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

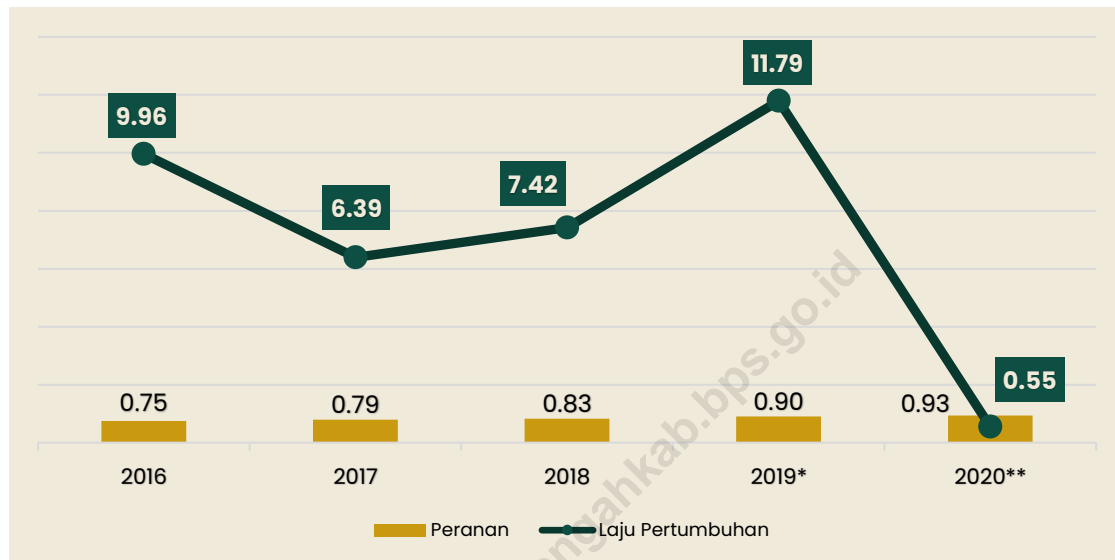
Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar rupiah)	56	63	68	77	79
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	39	41	44	49	50
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,75	0,79	0,83	0,90	0,93

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Meskipun mempunyai kontribusi yang kecil, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT selama dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan nilai yang cukup tinggi dimana pada periode 2015 hingga 2019 tumbuh selalu diatas 5 persen, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan mengalami peningkatan mencapai 7,42 persen. Hal ini disebabkan oleh maraknya aktivitas kampanye menjelang pemilihan umum tahun 2019. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana laju pertumbuhannya mencapai 11,79 persen yang disebabkan oleh penyelenggaraan pemilihan presiden dan pilkada di tahun 2019 yang lalu. Begitu juga peningkatan pada tahun 2016 yang mencapai 9,96 persen juga bertepatan dengan adanya pemilihan kepala daerah pada tahun 2016. Namun di tahun 2020, laju pertumbuhan konsumsi LNPRT mengalami perlambatan, hanya mampu tumbuh sebesar 0,55 persen dari tahun sebelumnya. Pandemi *covid-19* menyebabkan berbagai kegiatan lembaga nonprofit terhenti. Banyak organisasi yang menghentikan kegiatan, pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya karena harus menerapkan *physical distancing*. Selain itu, melemahnya perekonomian rumah tangga menyebabkan organisasi yang sumber keuangan utamanya dari iuran anggota, harus menghentikan iuran tersebut, agar tidak memberatkan anggota.

# tinjauan perekonomian

**Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## 3.4 PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pada wilayah di tingkat administrasi kabupaten, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terdiri dari pemerintah kabupaten tersebut dan pemerintah pusat dan provinsi yang berada di kabupaten tersebut. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dapat meningkatkan perekonomian secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung pengeluaran akhir konsumsi pemerintah dapat menarik sektor lain jika pembelian barang tersebut berasal dari produksi dalam negeri.

Selama tahun 2016-2020, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 600 miliar rupiah, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 802 miliar rupiah pada tahun 2019. Demikian pula halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

# tinjauan perekonomian

**Tabel 3.8 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

U r a i a n	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	959	1 037	1 090	1 156	1 149
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	617	651	668	684	661
Proporsi Terhadap PDRB ( % ADHB)	12,84	13,01	13,27	13,49	13,60
Konsumsi Pemerintah per Kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	5 191	5 497	5 665	5 894	5 744
b. ADHK 2010	3 343	3 452	3 474	3 483	3 303

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

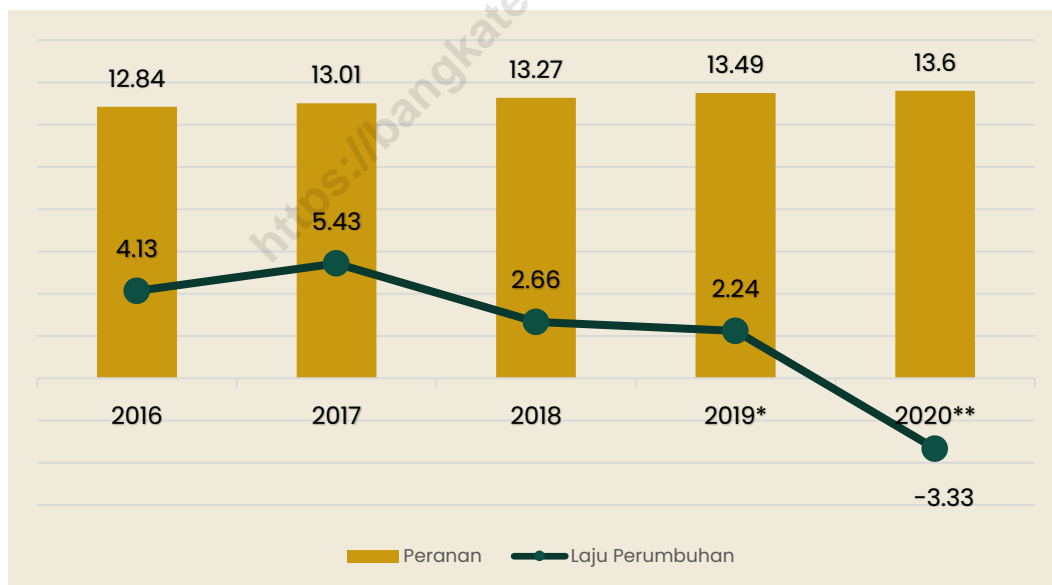
Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020, hal ini terlihat dari rata-rata konsumsi pemerintah perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 5,19 juta rupiah (lihat Tabel 3.8), dan terus meningkat hingga mencapai 5,90 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi 5,74 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya nilai konsumsi pemerintah serta semakin banyaknya jumlah penduduk.

Peranan yang disumbangkan oleh komponen konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, peranan konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 12,84 persen. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 peranannya juga semakin meningkat, masing-masing sebesar 13,01 dan 13,27 persen. Pada tahun 2019, meningkat menjadi 13,49 persen dan mencapai 13,60 persen di tahun 2020.

# tinjauan perekonomian

Gambaran tentang peningkatan konsumsi akhir pemerintah secara riil baik total maupun rata-rata per penduduk merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Secara keseluruhan, rata-rata konsumsi pemerintah pada 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang menurun cukup drastis. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,43 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar negatif 3,33 persen. Kenaikan signifikan pada tahun 2017 sebagian besar disebabkan karena adanya peningkatan belanja pegawai secara keseluruhan.

**Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Perkembangan pembangunan wilayah secara makro tidak terlepas dari perkembangan investasi. Investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti adanya peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan (*income*). Dalam

# tinjauan perekonomian

waktu yang panjang investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). PMTB dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik/kapital (selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB yang memiliki proporsi sekitar 30,56 persen terhadap total PDRB pada tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada tahun 2016, nilai PMTB Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 1.971 miliar rupiah, memberikan peranan sebesar 26,39 persen terhadap PDRB Kabupaten Selatan. Nilai PMTB mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai tahun 2019, yang mencapai nilai sebesar 2.771 miliar rupiah atau memberikan peranan sebesar 32,34 persen terhadap total PDRB. Namun pada tahun 2020, nilai dan proporsi PDRB PMTB mengalami penurunan. Nilai PMTB pada tahun 2020 adalah sebesar 2.771 miliar rupiah dengan peranan sebesar 30,56 persen.

**Tabel 3.9 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	1 971	2 192	2 443	2 771	2 582
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	1 275	1 335	1 431	1 555	1 448
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	26,39	27,50	29,74	32,34	30,56

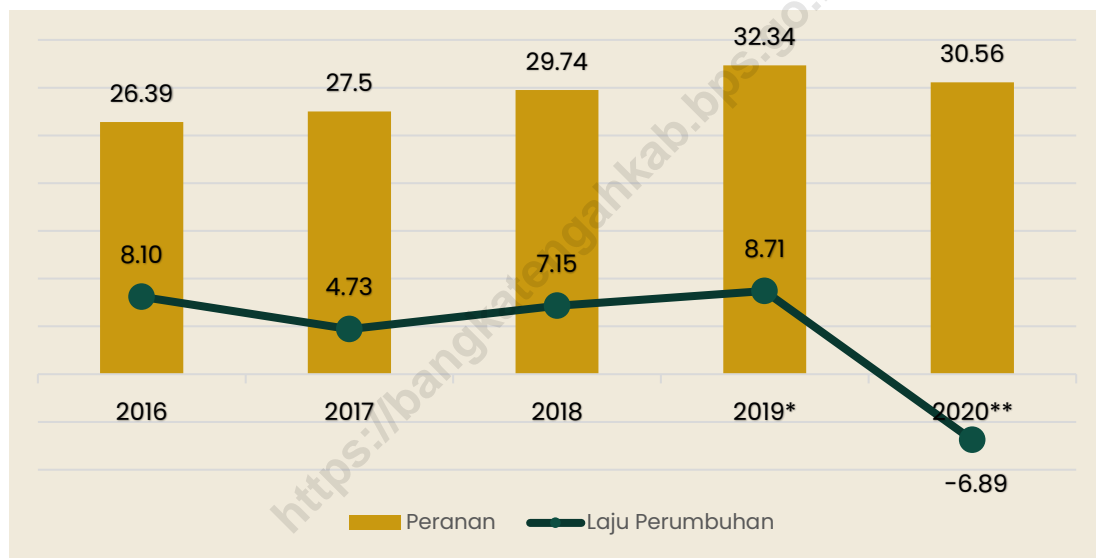
Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Secara riil, selama tahun 2016-2020 PMTB mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,36 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,71 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020

# tinjauan perekonomian

sebesar -6,89 persen. Nilai PMTB secara riil atau yang dihitung atas dasar harga konstan pada tahun 2016 adalah sebesar 1.275 miliar rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun terakhir. Namun, pada tahun 2020, nilai PMTB atas dasar harga konstan 2010 menurun menjadi 1.448 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai persediaan barang pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan sejenisnya. Sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai persediaan bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi/barang jadi, suku cadang, barang dalam perjalanan dan sejenisnya. Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping

# tinjauan perekonomian

komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih lanjut. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 3.10 Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perubahan Inventori					
a. ADHB (miliar rupiah)	40	28	30	35	4
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	40	27	31	36	6
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,53	0,35	0,37	0,41	0,05

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Nominal perubahan inventori selama tahun 2020 sebesar 4 miliar rupiah, menurun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Total perubahan persediaan 2020 dibandingkan dengan 2019 adalah sebesar 31 miliar rupiah. Antara tahun 2016 hingga 2018 besaran nominal komponen ini berfluktuasi yakni 40 miliar rupiah pada tahun 2016, 28 miliar rupiah pada tahun 2017 dan 30 miliar rupiah pada tahun 2018.

Selama tahun 2016-2020, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB cukup berfluktuasi. Tahun 2016, komponen ini mengambil peran sebesar 0,53 persen. Namun peranannya menurun hingga tahun 2017 menjadi sebesar 0,35 persen. Tahun 2018 dan 2019, proporsi komponen mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,37 persen dan 0,41 persen.

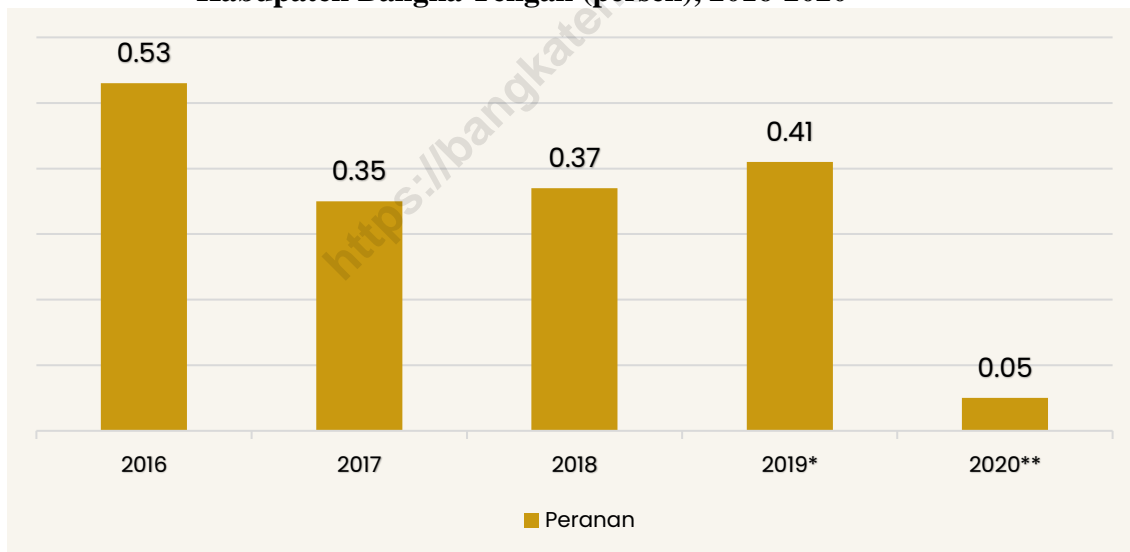


# tinjauan perekonomian

Proporsi perubahan inventori yang berada pada kisaran 1-2 persen menunjukkan distribusi atau pemasaran di Kabupaten Bangka Tengah masih berjalan dengan baik.

Peranan perubahan inventori terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 cukup tinggi disebabkan oleh tingginya produksi timah pada tahun tersebut. Seiring dengan menurunnya persediaan timah dan hasil industri logam timah di Kabupaten Bangka Tengah dan ditutupnya salah satu perusahaan timah di Kabupaten Bangka Tengah, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB juga semakin menurun. Pada 2020, penurunan proporsi disebabkan oleh pandemi *covid-19*. Beberapa penyumbang terbesar dalam perubahan inventori tersebut adalah komoditas ekspor seperti timah, lada, CPO, karet dan lainnya.

**Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2016-2020**



Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## 3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar

# tinjauan perekonomian

provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Peran perdagangan antar wilayah cukup penting dalam perekonomian suatu daerah. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya secara penuh akan berusaha mendatangkan barang dan jasa dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhan domestik juga terdorong untuk memperluas pemasarannya ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa juga semakin meningkat, kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

# tinjauan perekonomian

**Tabel 3.1 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Net Ekspor Barang dan Jasa</b>					
a. ADHB (miliar rupiah)	- 500	- 853	-1 405	-2 021	-1 896
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	- 1	- 78	- 194	- 453	- 427
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,82	-6,70	-10,70	-17,11	-23,42

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Pada tabel 3.11 terlihat bahwa pada tahun 2016, posisi neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bangka Tengah memang sudah bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bangka Tengah dalam posisi defisit, yang berarti nilai ekspor antar daerah lebih kecil dari pada impor antar daerah. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 2.021 miliar rupiah, namun pada tahun 2020, nilai defisit mengalami penurunan mejadi 1.896 miliar rupiah.



# PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

# perkembangan agregat PDRB

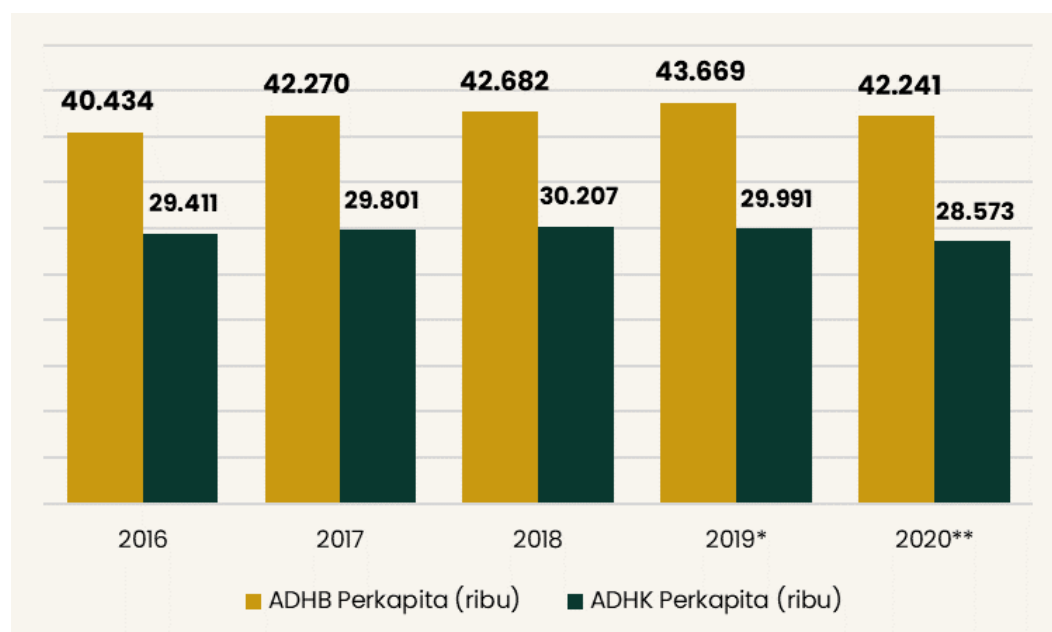
Dalam analisis sosial ekonomi, penggunaan data PDRB sebagai indikator ekonomi makro sering dilakukan di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Perangkat data PDRB tersebut dapat menghasilkan beberapa rasio (perbandingan relatif) untuk melengkapi analisis yang ada, seperti disajikan pada uraian berikut ini.

## 4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran akan menghasilkan data PDRB menurut pengeluaran. Dari *series* data PDRB menurut pengeluaran tersebut dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita.

**Gambar 4.1 PDRB per Kapita Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (ribu rupiah), 2016-2020**



# perkembangan agregat PDRB

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	7 469	7 972	8 213	8 568	8 449
b. ADHK 2010	5 433	5 621	5 813	5 884	5 715
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	40 434	42 270	42 682	43 669	42 241
b. ADHK 2010	29 411	29 801	30 207	29 991	28 573
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	0,83	1,33	1,36	-0.72	-4,73

Keterangan: <sup>1</sup>Angka revisi \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Perkembangan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi tersebut berdampak terhadap perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bangka Tengah. Nilai PDRB per kapita selama periode tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010. Namun, dua tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2020, nilai PDRB per kapita ADHK 2010 mengalami penurunan. Secara nominal, PDRB per kapita pada tahun 2016 sebesar 40,43 juta rupiah. Lalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 43,67 juta rupiah. Namun pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita menurun menjadi 42,24 juta rupiah. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penurunan ini disebabkan oleh penurunan daya beli secara keseluruhan sebagai dampak dari pandemi *covid-19*. Jika dilihat secara rata-rata, maka PDRB per kapita yang tercipta selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 42,26 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Bangka Tengah rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar 42,26 juta rupiah per tahunnya.

Sementara itu, untuk perkembangan PDRB per kapita secara riil untuk nilainya mengalami peningkatan rata-rata sekitar -0,69 persen per tahun selama kurun waktu 2016-2020. Besaran nilai PDRB per kapita ADHK di tahun 2016 sebesar 29,41 juta rupiah meningkat menjadi 30,21 juta rupiah pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019-2020 nilai PDRB per kapita ADHK 2010 mengalami kontraksi. Pada 2019, pandemi *covid-19* memang belum

# perkembangan agregat PDRB

terjadi, namun laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 menyebabkan nilai PDRB perkapita lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontraksi PDRB per kapita ADHK 2010 pada 2020 disebabkan oleh pandemi *covid-19*.

## 4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 yang menyajikan perbandingan konsumsi rumah tangga dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam kurun waktu 2016-2020. secara rata-rata rasio yang tercipta diatas 2. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tersedia (*supply*) lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga sekitar 2 kali daripada permintaan untuk investasi fisik (PMTB). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah berkembang dengan tingkat konsumsi rumah tangga diatas investasi.

**Tabel 4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	4 943	5 505	5 987	6 550	6 531
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	1 971	2 192	2 443	2 771	2 582
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap PMTB	2,51	2,51	2,45	2,36	2,53

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Selama kurun waktu 2016-2020, perkembangan rasio mengalami penurunan setiap tahunnya, kondisi ini menandakan bahwa permintaan untuk investasi fisik (PMTB) mengalami peningkatan setiap tahunnya.



# perkembangan agregat PDRB

## 4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari domestik maupun impor) dalam menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 4.3 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)</b>					
a. Rumah Tangga	4 943	5 505	5 987	6 550	6 531
b. LNPRT	56	63	68	77	79
c. Pemerintah	959	1 037	1 090	1 156	1 149
Jumlah	5 958	6 605	7 145	7 783	7 759
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	7 469	7 972	8 213	8 568	8 449
Proporsi	79,77	82,85	87,00	90,83	91,83

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (di atas 70 persen). Peningkatan konsumsi akhir setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020, diikuti peningkatan proporsinya terhadap PDRB. Pada tahun 2016, proporsi konsumsi akhir Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 79,77 persen, meningkat menjadi 91,83 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan akan produk yang dihasilkan untuk memenuhi konsumsi domestik. Dengan kata lain, produk yang tidak digunakan untuk konsumsi akhir, antara lain untuk investasi fisik (PMTB) atau untuk dieskpor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Tengah memiliki peran yang lebih kecil.

# perkembangan agregat PDRB

## 4.4 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Ekspor-impor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi, baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non residen yang berasal dari luar kabupaten/kota, baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56)

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa. Jika nilai ekspor positif dapat diartikan neraca perdagangan mengalami surplus. Sebaliknya, jika net ekspor negatif maka neraca perdagangan mengalami defisit.

**Tabel 4.4 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor (X – M) (miliar rupiah)	-500	-853	-1 405	-2 021	-1 896
Peranan Net Ekspor (%)	-6,69	-10,70	-17,11	-23,59	-22,44
Net Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	-1	-78	-194	-453	-427

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Neraca perdagangan Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami defisit dan kecenderungannya semakin menurun. Pada tahun 2016, neraca perdagangan mengalami defisit 1 miliar rupiah. Pada tahun 2020, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 427 miliar rupiah. Dengan kata lain, nilai impor Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 lebih besar dari pada nilai ekspor.

Pertumbuhan net ekspor selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan turunnya kuantitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan, yang mengakibatkan kegiatan ekspor barang dan jasa juga mengalami penurunan, terutama untuk komoditas timah. Jika dikaitkan dengan keadaan di lapangan, terjadinya penurunan nilai ekspor merupakan dampak tutupnya salah satu perusahaan pertambangan dan industri *smelter* di Kabupaten Bangka Tengah.

# perkembangan agregat PDRB

## 4.5 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit, dengan formula sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:

$I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = *Output* tahun ke t

$Y_{t-1}$  = *Output* tahun ke t-1

# perkembangan agregat PDRB

**Tabel 4.5 Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Bangka Tengah, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	5 433	5 621	5 813	5 884	5 715
Perubahan (miliar rupiah)	161	188	192	71	-169
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1 275	1 335	1 431	1 555	1 448
ICOR	7,92	7,10	7,45	21,90	-8,57

Keterangan: †Angka revisi \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa selama tahun 2016-2020 besaran ICOR cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 nilai ICOR adalah sebesar 7,92 yang berarti untuk menaikkan output sebesar 1 miliar rupiah, membutuhkan investasi sebesar 10,29 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya, penambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor lain selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*). Pada tahun-tahun setelahnya, ICOR mengalami fluktuasi dan pada tahun 2020, nilai ICOR ikut tergerus sebagai dampak dari pandemi *covid-19* sehingga bernilai -8,57.





# PENUTUP





# penutup

- a. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah pada periode bersangkutan. Berbeda dengan analisis ekonomi dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi, analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- b. Analisis yang disajikan merupakan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar daerah. Analisis tersebut didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dengan menambahkan beberapa indikator sosial demografi, seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai pemerintah, hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- c. Penyajian data dalam publikasi ini dalam bentuk *series*, yaitu dari tahun 2016-2020. Hal ini untuk memudahkan dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Satuan dari masing-masing parameter juga berbeda-beda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- d. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
- e. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terhadap wilayah lain (*rest of the world*).







# LAMPIRAN



# lampiran

## Lampiran 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020

PENGGUNAAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.942.668	5.504.931	5.987.516	6.549.904	6.531.471
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	56.504	63.078	68.086	77.447	78.661
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	958.857	1.036.714	1.090.111	1.156.322	1.148.895
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.970.794	2.192.381	2.442.914	2.770.916	2.581.689
5. Perubahan Inventori	40.257	28.484	30.002	34.851	4.375
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-500.066	-853.378	-1.405.312	-2.021.844	-1.896.171
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>7.469.014</b>	<b>7.972.210</b>	<b>8.213.317</b>	<b>8.567.596</b>	<b>8.448.920</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## Lampiran 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bangka Tengah menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020

PENGGUNAAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.462.991	3.644.858	3.832.877	4.013.333	3.977.615
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38.713	41.186	44.243	49.460	49.732
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	617.610	651.120	668.410	683.410	660.652
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.274.678	1.334.958	1.430.445	1.555.091	1.447.978
5. Perubahan Inventori	39.792	26.943	30.881	36.138	5.805
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-940	-78.450	-194.159	-453.336	-426.758
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>5.432.844</b>	<b>5.620.615</b>	<b>5.812.697</b>	<b>5.884.096</b>	<b>5.715.024</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

## Lampiran 3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

PENGGUNAAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,18	69,05	72,90	76,45	77,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,75	0,79	0,83	0,90	0,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,84	13,01	13,27	13,49	13,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,39	27,50	29,74	32,34	30,56
5. Perubahan Inventori	0,53	0,35	0,37	0,41	0,05
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,69	-10,70	-17,11	-23,59	-22,44
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

# lampiran

**Lampiran 4** Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Tengah menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

PENGGUNAAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,79	5,25	5,16	4,71	-0,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,96	6,39	7,42	11,79	0,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,13	5,43	2,66	2,24	-3,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,10	4,73	7,15	8,71	-6,89
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>3,05</b>	<b>3,46</b>	<b>3,42</b>	<b>1,23</b>	<b>-2,87</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

**Lampiran 5** Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

PENGGUNAAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,90	5,82	3,43	4,47	0,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,70	4,93	0,48	1,75	1,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,69	2,56	2,43	3,75	2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,40	6,22	3,99	4,34	0,06
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>2,71</b>	<b>3,17</b>	<b>-0,38</b>	<b>3,05</b>	<b>1,53</b>

Keterangan: \*Angka sementara \*\*Angka sangat sementara

**Lampiran 6** Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Tengah (jiwa), 2016-2020

KABUPATEN	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bangka Tengah	184.720	188.603	192.429	196.196	200.016

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah  
Jl. Raya By Pass Koba 33681  
Telp/Fax: (0718) 7362084  
E-mail: [bps1904@bps.go.id](mailto:bps1904@bps.go.id)  
Homepage: <http://bangkatengahkab.bps.go.id/>

